

Kementerian Perikanan Bina Lembaga Adat Wapulaka Buton Selatan

SultraNET., batauga | Komunitas adat Wapulaka yang berada di Tiga Desa yaitu Desa Bahari, Bahari Dua dan Bahari Tiga Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan Pembinaan dari Kementerian Perikanan Republik Indonesia.

Pembinaan terhadap komunitas adat yang dimaksud berupa penguatan Kelembagaan adat bagi masyarakat adat yang berdomisili di pesisir.

Hal ini disampaikan Kepala Desa Bahari, La Jidi saat ditemui Awak Media ini di rumah jabatannya, Selasa (20/8/2019)

“Untuk tahap awal, tahun 2019 ini masuk pada tahap Sosialisasi yang akan digelar besok (21/8/2019) di Desa Bahari yang dikemas dalam Forum Group Discussion (FGD).”

Menurutnya, Pihak Pemerintah Desa dalam hal ini Desa Bahari, Bahari Dua dan Bahari Tiga sangat berharap kegiatan ini dapat memberi ruang bagi Pemerintah utamanya Pemerintah Kabupaten Buton Selatan guna memberi pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat Wapulaka dengan menetapkan Peraturan Daerah atau regulasi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka kesinambungan program ini.

“Harapan kami dari Pemerintah Trio Bahari (Desa Bahari Bahari Dua dan Bahari Tiga) agar pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Buton Selatan segera menerbitkan peraturan Daerah atau Perbup tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat wapulaka,” Harapnya

Ditemui terpisah. Telly, salah satu Tim Fasilitasi dari Kementerian Kelautan dan perikanan menuturkan bahwa kunjungannya kedaerah tersebut dalam rangka implementasi program dan merupakan kunjungan yang kedua kalinya, dimana

sebelumnya adalah tahapan identifikasi terhadap masyarakat adat wapulaka.

Dari hasil identifikasi sebelumnya disimpulkan bahwa masyarakat adat wapulaka memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan.

Adapun empat syarat itu adalah pertama memiliki komunitas adat, kedua, memiliki wilayah hukum adat, ketiga, memiliki peraturan adat dan yang ke empat memiliki kelembagaan adat.

“Kegiatan kami kali ini merupakan kegiatan yang merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya, dimana kami sudah awali dengan kegiatan identifikasi. saat ini kami bekerjasama dengan ahli antropologi dan sosiologi utk melakukan pemetaan atau mapping selanjutnya akan dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD),” Ungkapnya

Lebih jauh Pegawai Kementerian yang dikendalikan oleh Susi Puji Astuti itu mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Pembinaan Masyarakat adat Wapulaka merupakan implementasi dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat,

“Kebetulan kementerian Kelautan dan perikanan juga terus mengimplementasikan amanat Peraturan menteri kelautan dan perikanan No 8 tahun 2018 tentang Penetapan wilayah kelola Masyarakat Hukum adat dalam pemanfaatan ruang di WP 3 K,” Katanya

Diakhir pernyataanya, Telly mengharapkan kepada Bupati untuk memberi dukungan dalam penyusunan regulasi mengenai peengakuan dan perlindungan Masyarakat adat demi keberlangsungan program ini.

“Harapan kami adalah bahwa pemda dapat menetapkan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat Adat, baik itu dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Surat keputusan Bupati agar Program ini dapat dijalankan secara sustainable,” Pungkasnya (Abady)

POLTRAC Bombana Gelar Event Nasional, Hadirkan 1.000 Rider Se Indonesia

SultraNET, rumbia | Poleang Trail Adventure Community Bombana (Poltrac Bombana) bakal menggelar Event berskala nasional bertema Jelajah Alam Poleang (Jempol) Part I, nantinya rider bakal menjajal wilayah timur poleang meliputi wilayah Poleang Timur, Poleang Tenggara, Poleang Utara, Poleang Selatan, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, pada 26 Oktober 2019 mendatang.

Panitia Pelaksana Jempol I, Yudi Utama Arsyad kepada awak **Media HarapanSultra.COM** (19/8/2019) menargetkan event yang baru pertama kali digelar di bombana tersebut dapat menghadirkan 1.000 rider dari seluruh Indonesia.

“Kita menargetkan 1.000 peserta bisa hadir menjajal jalur timur poleang bombana,” Tuter Aktivis Ketua OKK KNPI Bombana itu.

Nantinya lanjut Yudi, para rider bakal melalui rute yang memanjakan mata, sehingga dengan event tersebut juga sekaligus dapat mempromosikan potensi wisata alam yang ada di wilayah penghasil emas tersebut.

“Rute kita juga bakal melewati bukit teletabies dan padang pajongang ini kita harapkan agar para rider termanjakan dengan keindahan alam bombana,” Bebernya

Ia berharap agar event yang bertepatan dengan hari ulang tahun bombana tersebut dapat memperkenalkan potensi alam dan wisata kepada para rider yang datang dari seluruh wilayah Indonesia. **(IS)**

Arhawi : HUT RI ke 74 Momentum Wakatobi Lebih Maju

SultraNET., wakatobi | Bupati Kabupaten Wakatobi, H. Arhawi mengharapkan agar momentum peringatan hari jadi Republik Indonesia ke 74 tahun, tanggal 17 agustus 2019 sebagai momen merefleksi diri untuk menata indonesia khususnya Wakatobi agar semakin maju dan siap menghadapi tantangan dimasa mendatang.

Hal tersebut disampaikan Arhawi usai menyaksikan peserta lomba gerak jalan indah SD dan SMP di rujab bupati, Rabu (15/08/2019).

“Merdeka bukan hanya terlepas dari penjajah tetapi kita harus merdeka dalam arti luas yakni tidak ada penindasan, tidak ada kekerasan dan penyelenggaraan pemerintah harus melibatkan masyarakat sehingga kemerdekaan ini benar-benar utuh,” ucapnya.

Kemerdekaan lanjutnya juga harus diikuti dengan semangat membangun Indonesia yang telah menjadi cita-cita bersama bahwa menjelang 100 tahun kemerdekaan yang diharapkan dapat menjadi negara keempat termaju dari lima negara maju didunia.

Terlebih di tahun 2019 ini tambahnya baru saja dihelat pemilihan umum Pilpres dan Pilcaleg sehingga mengakibatkan terjadi sekat-sekat diantara masing-masing pendukung sehingga momen ini diharapkan dapat menjadi alat perekat untuk persatuan bangsa.

“Polarisasi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat pileg dan pilpres kemarin Insya Allah akan menyatu kembali untuk kepentingan Indonesia yang lebih besar yaitu menyongsong indonesia Emas.” pungkasnya.

Laporan : Samidin

Bangkrut ?, PT. SSU Terus Jual Besi Smelter, Aparat Tidak Berdaya ?

SultraNET., rumbia | Penjualan Besi bahan pembangunan Smelter PT. Surya Saga Utama (SSU) di Lampangi Jaya, Desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana Terus berlanjut.

Bahkan dengan turunnya aparat bea cukai beberapa waktu lalu hingga melakukan penyegelan terhadap besi tersebut tetap tidak diindahkan, hingga terkesan tidak berdaya dengan perusahaan.

Seperti yang diketahui PT. SSU memasukkan peralatan smelter tersebut dengan fasilitas bebas pajak dari negara sehingga kendatipun perusahaan merugi namun dalam melakukan penjualan asset harus dilakukan sesuai mekanisme tanpa mengesampingkan kewajiban terhadap negara dan pemerintah daerah.

Awak media SultraNET., mencoba menelusuri kebenaran adanya pemuatan besi dan penjualan oleh PT. Surya Saga utama (SSU), (8/8/2019).

Benar saja ditemukan fakta, sebuah kapal Tongkang yang sedang melakukan aktifitas Pemuatan besi di area Jetty milik PT. SSU.

Namun ketika kami mencoba mengkonfirmasi kepada pihak perusahaan, tidak satupun pihak yang mau berkomentar bahkan terindikasi menghindari awak media yang hadir di lokasi tersebut.

Salah seorang petugas kepolisian yang ada di lapangan enggan berkomentar atas penjualan besi oleh pihak PT. Surya Saga Utama (PT SSU).

“kami tidak berwenag memberikan komentar, kami hanya melaksanakan tugas dari atasan,” tuturnya

Pihak perusahaan yang kami temui ketika dikonfirmasi terkait penjualan besi tiba-tiba berubah dan menyatakan tidak dapat berbahasa Indonesia, kendati sebelumnya sempat bercerita dengan menggunakan bahasa Indonesia secara fasih.

“Saya tidak bisa berbahasa Indonesia,” tutur Mr. Senya

Salah seorang pekerja di perusahaan tersebut membenarkan bahwa perusahaan telah melakukan pemuatan besi tua sejak beberapa hari lalu.

“Kenapa kalian baru muncul ini sudah yang ketiga kalinya perusahaan melakukan pemuatan besi,” ucapnya sembari meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan

Namun anehnya lagi, pihak Syahbandar Kabaena, Kabupaten Bombana. Arfa saat dikonfirmasi melalui telepon mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya pemuatan besi oleh perusahaan tersebut.

“Saya tidak tau kalau ada pemuatan besi di perusahaan itu, tidak ada yang pernah dikonfirmasi,” singkatnya

Laporan : Efendy

Editor : Idris

Galeri Gambar Penjualan Besi PT. SSU



Aktivitas Tambang PT. Narayana Di Kabaena Dapat Timbulkan Bencana

SultraNET., kabaena | Aktivitas PT. Narayana Lambale Selaras (NLS)

perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kelurahan Lambale, Kelurahan Dongkala dan Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur disinyalir dapat memicu bencana banjir dan merusak sumber mata air warga setempat.

Kekhawatiran tersebut diutarakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Amiadin, SH saat ditemui awak media, Rabu (7/8/2019) menurutnya, aktivitas penambangan di tiga wilayah tersebut sangat beresiko besar dikemudian hari. Sebab terdapat gunung Wumbu Tuwele yang menjadi penyangga sekaligus menjadi sumber mata air utama warga.

“Gunung yang di Kelurahan Lambale adalah satu-satunya sumber mata air utama yang digunakan warga. Sehingga seharusnya tidak dibolehkan ada aktivitas pertambangan di daerah itu,” Tutur Aleg dapil Kabaena selama empat periode itu.

Bahkan lanjut Ketua DPC PPP Bombana itu, sejak tahun 2008 lalu, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sultra telah melarang adanya aktivitas pertambangan di lokasi gunung tersebut, dimana saat itu masih dikelola PT Billy Indonesia .

“Saat itu, warga demo besar-besaran untuk menolak aktivitas penambangan di gunung itu. bahkan pihak ESDM turun dan tidak membolehkan lagi dilakukan penambangan di daerah itu,” tutur Amiadin.

Namun ironisnya setelah sekian lama PT Billy tidak beroperasi, kini muncul perusahaan yang bernama PT. Narayana Lambale Selaras (NLS) itu dan telah diberi izin untuk menambang di lokasi tersebut.

“Jika ini dipaksakan, maka saya pastikan kedepan akan berdampak pada rusaknya sumber mata air warga, bahkan dapat menimbulkan bencana banjir,” Urainya

Selain kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan, PT. NLS juga belum menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian ganti rugi lahan sebagian masyarakat, perekrutan tenaga kerja lokal dan kompensasi yang

sebelumnya telah disepakati.

“Padahal seharusnya, kehadiran perusahaan di wilayah ini dapat memberikan dampak positif, bukan memberikan dampak kerusakan serta kesengsaraan bagi masyarakat semata,” Harapnya

Untuk itu, dalam waktu dekat ini pihak DPRD Bombana bakal segera melakukan monitoring dan meninjau lokasi terkait aduan-aduan masyarakat. serta bakal memanggil pihak perusahaan..

“Mungkin sekarang kita belum rasakan, tetapi anak cucu kita mau kemana setelah semua hilang seketika karena bencana,” tutupnya dengan nada sedih. (IS)

Wakatobi Jadi Top Destinasi Nasional, Investasi Masuk Capai Ratusan Milyar

Wakatobi, SultraNET. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wakatobi patut diacungi jempol. Pasalnya, sejak tahun 2018 dinas yang melayani berbagai macam perizinan ini berhasil melayani investor hingga nilai investasi capai ratusan milyar.

Investasi tersebut bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun 2018 mencatat ada 43 investor dengan nilai investasi Rp.284 milyar yang mana jumlah tersebut berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 100 milyar sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 184 milyar.

Meskipun telah berkontribusi menaikkan jumlah investor, kinerja dan langkah mendukung visi misi Kabupaten Wakatobi bukan hanya sampai disitu.

Dinas yang sekarang dipimpin oleh Saoruddin, S.Pi M.Si tersebut pada tahun 2019 mampu melakukan pendataan terhadap investor menjadi 185 investor di seluruh wilayah kabupaten Wakatobi.

“hal ini disebabkan pada tahun 2018 pendataan belum terlalu intens. Pada tahun 2019 ini kami tidak hanya berharap terhadap laporan kegiatan namun secara langsung melakukan pendataan di lapangan, mendata perusahaan terutama data base perusahaan, ucap Saoruddin, Kamis (18/07/2019).

Tempat yang Layak Berinvestasi



Para Investor yang melakukan investasi di kabupaten Wakatobi tidak salah lagi menempatkan investasinya di daerah maritim ini.

Sebab pemerintah pusat telah menempatkan kabupaten wakatobi masuk dalam daftar 10 daerah top destinasi pariwisata nasional. Tentu dengan menjadi prioritas nasional daerah ini bakal mendapatkan perhatian yang

serius, baik dari segi pembiayaan maupun perencanaannya.

Langkah yang telah diambil pemerintah pusat bukan tanpa alasan. Kabupaten yang terdiri dari empat gugusan pulau-pulau ini punya berjuta-juta kekayaan yang nantinya dapat menarik para wisatawan. Bayangkan saja daerah tenggara Sultra ini merupakan salah satu cagar biosfer dari 8 yang ada di Indonesia.

Pada tahun 2012 United Nations Of Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan Wakatobi sebagai salah satu cagar biosfer bumi dari 621 cagar biosfer pada 117 Negara.

Belum lagi dilihat dari potensi wisata bawah laut yang begitu menjanjikan. Ada 123 spot diving dan dihiasi oleh 750 spesies karang, dan 942 jenis ikan. bahkan jumlah itu mengalahkan jumlah spesies karang yang berada di laut Karibia dan laut merah. Pantaslah kemudian Wakatobi disebut surga nyata bawah laut.

“Jika diibaratkan Wakatobi adalah Manusia maka Dia adalah perempuan cantik yang pantut disanjung karena pulau ini berada di pusat segitiga karang dunia dengan luas karang 118.000 hektar. Atol Kaledupa 48 kilometer yang merupakan Atol terpanjang di dunia,”ucap Arhawi belum lama ini.

Pelayanan Dinas PMPTSP Tingkatkan PAD



Proses Pelayanan Perizinan

Kabupaten Wakatobi patut berbangga, Meskipun sektor unggulan hanya melalui pariwisata, perikanan dan perdagangan antar pulau, ternyata hal itu tidak menyurutkan niat besar kepala dinas PMPTSP untuk bekerja maksimal mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Wakatobi.

Niat utama dinas PMPTSP bukan hanya soal peningkatan PAD. Dinas teknis ini sangat mengutamakan pelayanan sehingga hal itu dituangkan dalam visinya “penanaman modal berdaya saing dan berkelanjutan”. Kemudian dinas yang dipimpin mantan Kepala Bappeda tersebut merancang misi meningkatkan profesionalisme pelayanan perizinan, meningkatkan potensi promosi dan kerjasama penanaman modal, meningkatkan kualitas sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan.

Pelayanan perizinan yang baik ternyata sanggup mendobrak peningkatan PAD. tercatat, pada tahun 2018 pemerintah kabupaten Wakatobi melalui dinas Pananaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dalam jenis izin IMB dengan target Rp 74.800.000 mampu direalisasikan hingga mencapai Rp 131.154.277 yang jika ditarik persentasenya capai 175%. Jenis izin itu belum termasuk SITU-MB, HO/SITU Perseorangan, HO/ SITU badan usaha, SIU Perikanan Perseorangan, serta SIU perikanan badan usaha. Jika dihitung secara keseluruhan, dari target RP 501.280.000, realisasi PAD tahun 2018 justru meningkat 146% yaitu capai Rp 734.299.247.

Kendati demikian, pada tahun 2019 ini pihak PMPTSP akan lebih giat lagi merealisasikan target yang bakal dicapai. Pasalnya, diungkapkan Saoruddin bahwa dari beberapa jumlah izin yang menjadi sumber realisasi PAD pada tahun ini tidak akan lagi dipungut biaya retribusinya.

“Dengan berlakunya Permendagri nomor 19 tahun 2017 untuk segera mencabut perda mengenai izin gangguan maka sejak maret 2019 ini kami tidak lagi melakukan pemungutan retribusinya,”ungkapnya.

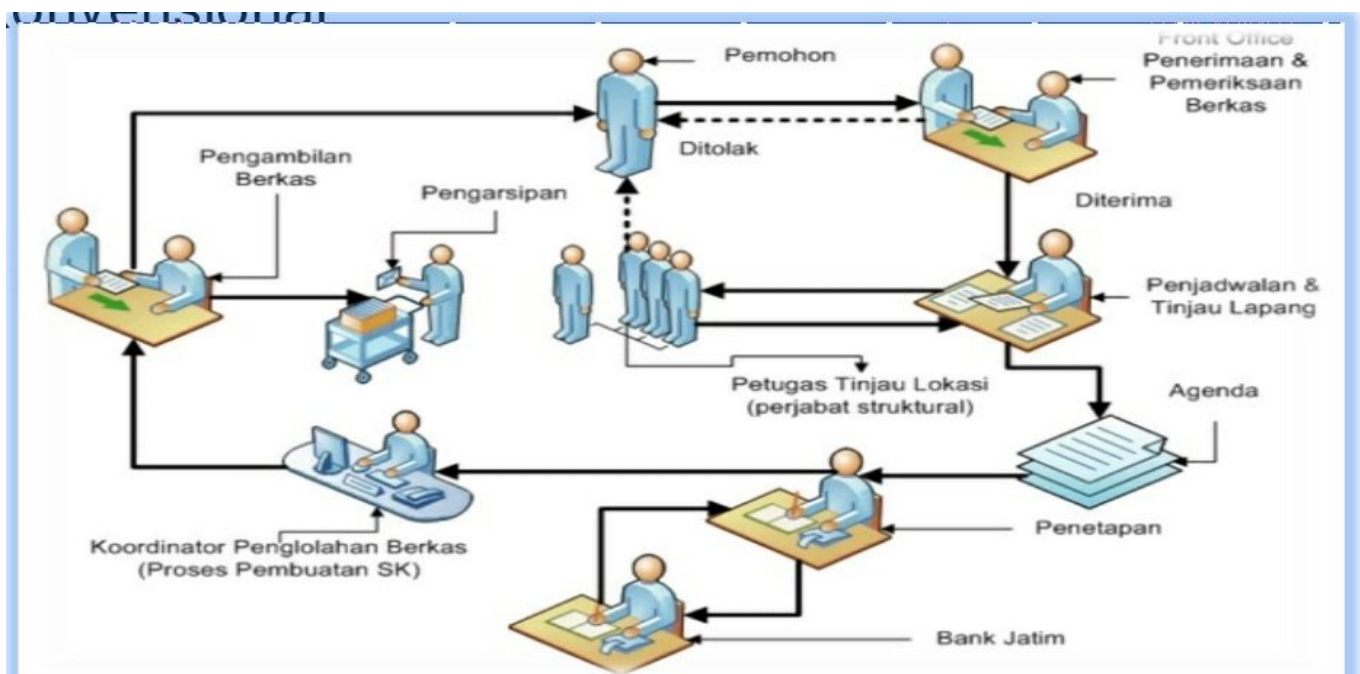
Makanya, jika dilihat dari tren perkembangan PAD melalui retribusi sejak tahun 2018 dibandingkan 2019 akan mengalami penurunan. Meski demikian, pihaknya akan terus bekerja memaksimalkan pelayanan agar PAD wakatobi melalui

berbagai jenis Izin yang lain mampu menyamai PAD pada tahun-tahun sebelumnya.

Layani 76 Jenis Izin, PMPTSP Gunakan Sistem Online

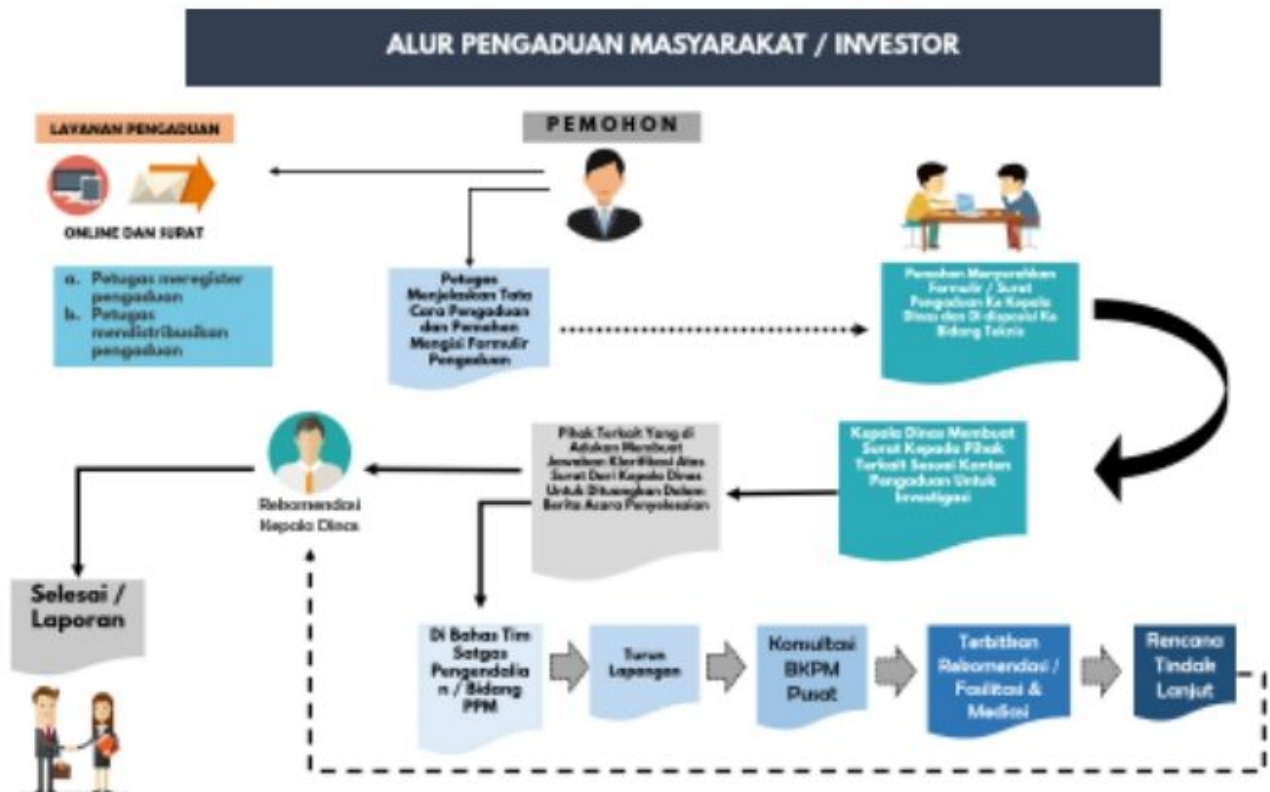
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) kabupaten Wakatobi saat ini melayani 76 jenis izin. Agar proses pembuatan izin lebih efektif dan efisien PMPTSP memberi ruang yang mudah kepada para investor salah satunya dengan membuat situs resmi yang dapat dengan mudah diakses. Mekanisme pelayanan perizinan menggunakan system online yakni melalui Sistem Aplikasi Perizinan Terpadu (SAPIRU) Online dengan alamat <http://perizinan.wakatobikab.net> dan juga dapat melalui Online Single Submission (OSS) Yang dapat diakses melaiui alamat <http://oss.go.id>.

Selain menggunakan pelayanan perizinan secara online PMPTSP juga dapat menerima proses perizinan secara konvensional. Mekanisme Pelayanan perizinan secara konvensional dapat dilihat melalui gambar berikut;



Sebagai bahan evaluasi dari dinas teknis ini, PMPTSP Menyediakan alur pengaduan masyarakat atau investor. Alur tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut ;

Pengendalian & Pengawasan



Dinas PMPTSP Terlibat Aktif Sosialisasikan Pelayanan Perizinan



Pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah beberapakali menggelar sosialisasi pelayanan perijinan melalui berbagai item kegiatan.

Di Aula Pesanggarahan Wangi-wangi selatan pada Kamis (28/02/2019) lalu, dinas PMPTSP menggelar Sosialisasi dengan tema “memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan memiliki kepastian hukum”.

Dalam Sosialisasi yang dihadiri puluhan Pengusaha, Investor, dan Forkopimda tersebut memaparkan berbagai langkah-langkah teknis dalam membuat berbagai jenis Surat ijin baik itu berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Hordo Ordonantie atau Surat Ijin Tempat Usaha (HO/SITU), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUper), Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK), Surat Ijin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar), Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut (IUPAL), Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA), Serta Surat Ijin Praktek Dokter (SIPD).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Saoruddin berharap kepada semua Investor dan Pengusaha dapat dengan mudah membuat Ijin Sesuai dengan Jenis Usaha yang dimiliki.

“Sekarang untuk mengurus berbagai surat ijin sudah sangat dimudahkan karena dapat dilakukan secara elektronik dan secara konvensional,” jelasnya.

Bukan Hanya itu, pada kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Wakatobi, pekan lalu dalam rangka untuk mendorong terwujudnya industrialisasi perikanan yang unggul dan berdaya saing, Kepala dinas PMPTSP turut terlibat menjadi pemateri.

Dalam kegiatan tersebut kepala dinas jebolan Institut Pertanian Bogor tersebut membawakan materi mengenai kebijakan mekanisme pelayanan investasi di kabupaten wakatobi.

“Bukan hanya soal perizinan, namun kami selalu turut berpartisipasi mendorong industri perikanan dan berbagai investasi yang masuk di kabupaten wakatobi,” Ucap Saoruddin.

Pertemuan yang dilaksanakan di gedung villa Dasita, Wandoka kecamatan Wangi-wangi tersebut turut dihadiri para pelaku usaha hasil olahan ikan, dinas terkait, serta dihadiri pemateri dari konsultan FTA center makassar, Chairil Burhan dan Muhammad Sabranjamil Alhaqqi. (ADV)

Laporan ; Samidin

Hasil Melimpah, Panen Raya

Rumput Laut Libatkan Pemda Wakatobi

Wakatobi, SultraNET. | Panen Raya rumput laut Masyarakat yang di gelar di lapangan desa Liya Bahari indah turut melibatkan pemerintah Daerah Wakatobi, Senin (29/07/2019).

Panen rumput laut seliya raya ini merupakan keinginan masyarakat petani rumput laut sebagai rasa syukur kepada Allah dengan besarnya peningkatan hasil produksi, jumlah pembudidaya, meningkatnya pendapatan dan pengetahuan pola taman serta adanya dukungan pemda wakatobi dan stekholder.

Jumlah pembudidaya rumput laut ini setelah dua tahun terakhir yang sebelumnya hanya 87 rumah tangga nelayan sekarang menjadi 176 rumah tangga nelayan. Peningkatan hingga capai seratus persen tersebut dipengaruhi oleh bibit yang digunakan. Jika sebelumnya menggunakan bibit spinosum dengan hasil produksi hanya capai 100 ton, kini dengan menggunakan bibit kotoni para pembudidaya mampu menghasilkan 201 ton rumput laut.

“Sebelumnya hasil produksi dibawah 100 ton perbulan dimasa puncak panen seperti ini sekarang lebih dari 200 ton perbulan. Sebelumnya hanya menggunakan bibit spinosum dengan harga yang lebih murah sekarang mulai menggunakan bibit kotoni yang lebih mahal” ujar kepala dinas kelautan dan perikanan, Jalaluddin saat membawakan sambutannya.

Bupati wakatobi di waktu yang sama mengatakan, pemerintah daerah akan terus mensupport tiga klaster visi misi kabupaten wakatobi yaitu maritim, sejahtera dan berdaya saing. Hal itu diutarakan sebab wakatobi pada potensinya memiliki luas lautan yang capai 97 persen sedang daratan hanya 3 persen.

“Tiga kekuatan untuk dapat mensejahterakan masyarakat kita yaitu potensi dipermukaan laut yakni perdagangan antara pulau, tengah laut seperti budidaya rumput laut dan dasar laut yaitu pariwisata,” jelasnya.

Selain besarnya motivasi masyarakat dalam mengembangkan potensi rumput

laut, disisi lain bupati wakatobi juga terus mengapresiasi dan mendukung berbagai pihak khususnya yang berorientasi pada pertumbuhan Ekonomi pembudidaya rumput laut baik berupa modal, bibit dan pelatihan pemasaran terhadap stekholder.

“Kita perlu meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya rumput laut ini. Alhamdulillah dengan adanya NSLIC dan WWF masuk ke daerah kita, akhirnya dapat membuahkan hasil seperti yang sedang kita lihat bersama-sama ini,”ucapnya.

Besarnya peningkatan hasil rumput laut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, dalam panen raya rumput laut, NSLIC turut memakerkan rumput laut yang dinamakan F1. Jenis ini dihasilkan melalui hasil kultur jaringan yang diberikan PT. Baruna Sejahtera sebanyak 150 Kilogram. Alhasil, dari tiap 1 Kg bibit rumput laut mampu menghasilkan 5 Kg rumput laut tiap panennya.

Setelah menggelar kegiatan secara seremonial pemda wakatobi yang dipimpin bupati wakatobi turut terlibat melakukan panen rumput laut bersama masyarakat.

Diketahui dalam kegiatan tersebut turut hadir wakil direktur National Support Local investment Climate (NSLIC) Feri Junifer, Perwakilan WWF, serta perwakilan dari kampus kelautan dan perikanan Wakatobi.

Laporan ; Samidin

Diduga Karena Cemburu, 2 Warga di Jeneponto Tewas, Ini Kronologinya

SultraNET. | Peristiwa berdarah terjadi di Dusun Batu Le'leng Barat, Desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Rabu

(24/07/2019), sekitar pukul 04.30 WITA.

Dua orang warga setempat tewas, masing masing bernama Mappaence berusia 73 tahun, pekerjaan Nelayan dan Bisa Dg Kulle berusia 71 tahun.

Kronologi kejadian sesuai informasi yang diperoleh dari Kasubbag Humas Polres Jeneponto AKP Syahrul, awalnya pelaku Bisa Dg Kulle mendatangi rumah Korban Mappaence yang sedang membersihkan alat penangkap ikan yang rumahnya berhadapan dengan rumah pelaku dengan membawa sebilah Parang yang terhunus dan langsung memarangi Korban beberapa kali.

“Setelah Korban jatuh dan tidak berdaya lagi pelaku meninggalkan korban dan kembali kerumahnya lalu mengunci pintu rumahnya,” ungkap Syahrul, Rabu pagi (24/07/2019).

Sekitar pukul 06.00 Wita, lanjut Syahrul, keluarga korban berdatangan mengepung rumah pelaku dan hendak melakukan pembalasan namun pelaku bertahan sehingga massa semakin banyak berdatangan melempari rumah pelaku serta membongkar dinding rumah pelaku sehingga pelaku turun dari rumah lalu melarikan diri sambil membawa parang sehingga dikejar oleh massa dan dilempari batu yang mengakibatkan pelaku terjatuh,

“Saat itulah pelaku (Bisa Dg Kulle) dianiaya oleh beberapa orang massa dengan cara dipukul menggunakan kayu balok beramai-ramai dan sehingga pelaku tidak sadarkan diri,” kata AKP Syahrul, mengurai kronologi kejadian.

Bisa Dg Kulle mengalami luka di kepala bagian bawah kanan, luka pada bibir dan hidung serta bengkak pada kepala dan di rujuk ke RSUD Lanto Dg. Pasewang Jeneponto.

“Namun sekitar pukul 09.20 WITA, Bisa Dg Kulle meninggal dunia di RS Lanto Dg Pasewang,” imbuh Syahrul.

Sementara itu korban Mappaence yang meninggal dunia di lokasi kejadian mengalami luka terbuka pada Leher Kanan, Luka terbuka pada Dada Kanan, luka terbuka pada pelipis kiri, luka terbuka pada lengan kanan, dan jari tangan kiri

putus.

“Adapun motif pada kejadian itu, diduga pelaku BISA DG KULLE merasa dendam dengan Korban MAPPAENCE karena merasa cemburu karena mencurigai korban (Mappaence) menjalin hubungan asmara dengan istri Pelaku,” pungkas Syahrul. (AB/Britasulsel.com)

Sumber Asli :

<https://beritasulsel.com/baca/terjadi-pembunuhan-di-jenepono-2-warga-tewas-begini-kronologinya>

Penyesuaian NJOP PBB, Abady Makmur Harap Bupati Bombana Respon Rekomendasi DPRD

Rumbia, SultraNET. | Keluarnya tiga poin rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemerintah Kabupaten Bombana terkait terbitnya Surat Keputusan Bupati Bombana nomor 121 tahun 2019 yang banyak dikeluhkan masyarakat hingga ramai menjadi topik pemberitaan media belakangan ini mendapat tanggapan positif dari warga di daerah itu.

Abady Makmur, salah satu warga yang turut hadir pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana, kepada awak media SultraNET., Senin (22/7/2019) mengapresiasi langkah DPRD yang mengeluarkan tiga rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Bombana.

Menurut mantan Anggota DPRD Kabupaten Bombana selama dua periode itu, rekomendasi peninjauan kembali terhadap SK No 121 Tahun 2019 itu merupakan

langkah tepat karna ada mekanisme yang diabaikan oleh Pihak OPD dalam penentuan NJOP dimana sesuai penjelasan saat RDP bahwa penentuan NJOP dilakukan dengan cara mengambil sampel pada 6 Kecamatan saja dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana.

“Jadi pihak BKD tidak menerapkan ketentuan pasal 4 ayat 3 PMK No 208/pmk.7/2018,” Tutar Abady Makmur.

Pria yang kerap digadang-gadang sebagai bakal Calon Bupati Bombana kedepan tersebut juga mendukung rekomendasi agar Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2013 yang menjadi salah satu rujukan payung hukum diberlakukannya SK Bupati Bombana Nomor 121 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bombana Nomor 17.a tahun 2014 tentang Penetapan Klasifikasi Zona Nilai Tanah, Bangunan dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah Kabupaten Bombana agar segera direvisi.

“Karena Perda itu sudah tidak relevan lagi dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No 208/pmk.7/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan” Bebernya

Untuk itu, ia mewakili masyarakat Kabupaten Bombana yang hadir pada rapat RDP tersebut mengharap agar dengan dikeluarnya tiga poin rekomendasi DPRD itu, Pemerintah Kabupaten Bombana dapat merespon dan menjalankan rekomendasi DPRD sebagai representasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Bombana.

“Dengan keluarnya rekomendasi DPRD itu, saya berharap Bapak Bupati Bombana dapat merespon agar mekanisme penentuan NJOP dapat diterapkan sesuai ketentuan yang ada,” Pungkasnya

Adapun ketiga poin rekomendasi sesuai hasil RDP yaitu pertama DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengkaji ulang perhitungan NJOP dalam SK 121 tahun 2019, kedua DPRD merekomendasikan untuk mengevaluasi kembali perda nomor 1 tahun 2013, ketiga DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana agar Memastikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak

(SPOP) sampai ke masyarakat sebelum menetapkan Perbup terkait penyesuaian NJOP. (IS)

Ribuan Anak Usia Sekolah Di Wakatobi Dapat Bantuan Pendidikan

Wakatobi, SultraNET. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara ternyata tidak main-main dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan pemberian bantuan kepada ribuan siswa miskin maupun yang berprestasi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Wakatobi mengklaim, ribuan anak usia sekolah di Wakatobi telah mendapatkan bantuan pendidikan. Katanya, Untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun pelajaran 2018/2019 saja capai 962 siswa sedangkan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) mencapai 6.620 siswa.

“jadi total bantuan dari pemerintah baik BSM maupun PIP sebanyak 7.582 siswa dari 12.129 orang siswa,” terang Aliwangi Saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (17/07/2019).

Demikian jika ditarik persentasenya berarti ada 61% siswa sekolah dasar telah menerima bantuan dari pemerintah. Sisa 39% katanya, merupakan siswa dengan kategori mampu.

Kemudian, begitu juga untuk sekolah menengah pertama penerima BSM berjumlah 539 siswa sedangkan PIP berjumlah 4.522 siswa. Total keseluruhan siswa SMP yang mendapatkan bantuan BSM maupun PIP berjumlah 5.061 siswa dari 6.024 siswa SeWakatobi.

*“Presentasenya 82 % siswa. Sisanya 18 % merupakan siswa kategori mampu,”
Jelasnya.*

Saat ditanya mengenai penerima ganda bantuan BSM maupun PIP Aliwangi mengatakan nama-nama siswa yang telah masuk di BSM tidak akan bisa masuk di data PIP.

“Sebab semua data yang masuk ke dinas pendidikan sudah terkontrol oleh sitem,” Ucapnya.

Program bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini ternyata mampu menekan angka putus sekolah. Aliwangi mengungkapkan, setiap tahun angka putus sekolah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jumlah angka putus sekolah itu kata Dia, bisa dilihat dari jumlah usia sekolah yang mengikuti ujian paket A, B dan C.

Menurutnya angka putus sekolah ini diakibatkan oleh perpindahan penduduk yang dilakukan orang tua siswa keluar Wakatobi. Sedangkan saat pindah, siswa tersebut tidak dibarengi dengan surat keterangan pindah sekolah.

“kita tidak tau apakah disana mereka sekolah atau tidak sebab tidak ada surat pindahnya,” pungkasnya

Untuk diketahui, rekapitulasi data putus sekolah di seluruh wilayah kabupaten Wakatobi tahun 2019 pada anak usia sekolah (05-15 tahun) mencapai 269. Data tersebut belum termasuk angka putus sekolah pada usia 16-20 tahun.

Laporan : Samidin